

**PERATURAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1979  
TENTANG  
PENYUSUTAN ARSIP**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang**
- a. bahwa volume arsip sebagai akibat kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangun berkembang dengan cepat seiring dengan dinamika kehidupan bangsa.
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan tepat guna kearsipan serta untuk menjamin keselamatan bagan pertanggungjawaban nasional seperti dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor tahun 7 Tahun 1971, dipandang perlu mengatur penyusutan arsip dalam Peraturan Pemerintah.
- Mengingat**
1. Pasal 5 ayat (2) Undangh-undang Dasar 1945
  2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomoe 2964)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYUSUTAN ARSIP

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah naskah-naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971.
2. Arsip dinamis adalah arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1971.
3. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
4. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
5. Arsip statis adalah arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971
6. Unit Kearsipan adalah unit organisasi sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971

**Pasal 2**

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara :

- a. Memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam lingkungan Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan masing-masing.
- b. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- c. Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional

**Pasal 3**

Pengelolaan arsip inaktif pada Lembaga Negara atau Badan Pemerintahan merupakan bagian tugas dari Unit Kearsipan pada Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan yang bersangkutan

## **BAB II JADWAL RETENSI ARSIP**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap arsip ditentukan retensinya atas dasar nilai kegunaannya dan dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip
- (2) Arsip Nasional menetapkan pedoman untuk digunakan sebagai petunjuk dalam menentukan nilai guna arsip
- (3) Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan masing-masing wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang berupa daftar berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip

### **Pasal 5**

- (1) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional.
- (2) Dalam menentukan retensi arsip keuangan dan atau arsip kepegawaian terlebih dahulu perlu didengar pertimbangan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan atau Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (3) Untuk Jadwal Retensi Arsip pemerintahan daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat Menteri Dalam Negeri.
- (4) Setiap perubahan Jadwal retensi Arsip ditetapkan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

## **BAB III PEMINDAHAN ARSIP**

### **Pasal 6**

- (1) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan masing-masing menyelenggarakan pemindahan arsip inaktif dan Unit Kearsipan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip secara teratur dan tetap.
- (2) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif diatur oleh masing-masing Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan.

## **BAB IV PEMUSNAHAN ARSIP**

### **Pasal 7**

Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan dapat melakukan pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Retensi Arsip masing-masing.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pemusnahan arsip yang mempunyai jangka retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan setelah mendengar pertimbangan Panitia Penilai Arsip yang dibentuk olehnya dengan terlebih dahulu memperlihatkan pendapat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang menyangkut arsip keuangan dan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sepanjang menyangkut arsip kepegawaian.
- (2) Pimpinan Lembaga Negara atau Badan Pemerintahan menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional.

### **Pasal 9**

Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya dan disaksikan oleh 2 (dua) pejabat dari bidang hukum/perundang-undangan dan atau bidang pengawasan dari lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan yang bersangkutan.

## **Pasal 10**

Untuk melaksanakan pemusnahan dibuat Daftar Pertelaan Arsip dari arsip-arsip yang dimusnahkan dan Berita Acara Pemusnahan Arsip.

## **BAB V PENYERAHAN ARSIP**

### **Pasal 11**

Arsip yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional, tetapi sudah tidak diperlukan lagi untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari, setelah melampui jangka waktu penyimpanannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi arsip yang disimpan oleh Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan di tingkat Pusat harus diserahkan kepada Arsip Nasional Pusat.
- b. Bagi arsip yang disimpan oleh Badan-badan Pemerintahan di tingkat Daerah harus diserahkan kepada Arsip Nasional Daerah.

### **Pasal 12**

Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun serta dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip yang disertai Daftar Pertelaan Arsip dari arsip-arsip yang diserahkan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

1. Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan yang mengetahui adanya dan atau mengetahui akan dimusnahkannya arsip badan-badan Swasta dan atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 serta arsip tersebut dianggap bernilai guna bagi bidang tugasnya masing-masing atau bagi kehidupan kebangsaan pada umumnya wajib ikut menyelematkannya dan atau melaporkan kepada Arsip Nasional.
2. Berdasarkan adanya laporan dan atau karena mengetahui sendiri Arsip Nasional mengambil tindakan pengamanan atau penyelamatan arsip-arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971.
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 12 berlaku bagi Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

### **Pasal 14**

Penyusutan Arsip dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan karena sifat khusus tugas dan fungsinya, bilamana perlu dapat diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 15**

Penyusutan Arsip yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan sifat kerahasiaan sesuatu arsip.

### **Pasal 16**

Semua pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan peraturan Perintah ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintah yang bersangkutan.

## **BAB VII KETANTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Selama Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 belum dimiliki akan tetapi belum mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional, maka Lembaga Negara atau Badan Pemerintah :

- a. Yang akan melaksanakan pemusnahan arsip wajib mendapat persetujuan dari Badan-badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- b. Yang akan menyelenggarakan penyerahan arsip wajib berkonsultasi dengan Arsip Nasional.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Ketentuan teknis pelaksana peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan sendiri.

**Pasal 20**

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Oktober 1979

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd**

**S O E H A R T O**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Oktober 1979

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ttd**

**SUDHARMONO, S.H.**